

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi merupakan bentuk realitas ataupun fenomena sosial yang pada saat ini kehadirannya berada di tengah-tengah masyarakat di hampir seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, dunia menjadi tempat berinteraksi dan saling integrasi tanpa adanya batas-batas ruang dan waktu karena percepatan arus globalisasi yang kian mencuat. Efek domino yang ditimbulkan dari arus globalisasi membuat tiap negara di seluruh dunia ikut merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bahasa, pengertian globalisasi dapat dijelaskan sebagai kombinasi antara kata "global" yang berarti "mendunia" dan kata "sasi" yang berarti "proses". Jadi, jika digabungkan, pengertian globalisasi menurut bahasa menjadi "proses yang mendunia". Kata "globalisasi" sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu "globalization".(Levitt, 1983) Dalam dunia yang dinamis diiringi dengan adanya percepatan globalisasi, menjalin kerja sama merupakan hal dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kerja sama merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Dougherty & Pfaltzgraff, Kerja sama adalah sikap yang bersedia untuk bekerja secara kolektif tanpa memandang latar belakang orang yang terlibat, dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama. Dalam Hubungan Internasional, negara-negara selalu dipandang memiliki ciri khas masing-masing yang ingin dipertahankan dan diperkenalkan. Dalam hal ini melakukan pertukaran budaya menjadi cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengenal budaya dari negara lain dan juga memperkenalkan budaya lokal. Sejak dahulu, berbagai belahan dunia telah melakukan pertukaran budaya dan kontak sosial. Dengan semakin terbukanya peluang, para ahli melebarkan definisi kerja sama antarnegara menjadi kerja sama internasional.

Saat ini kerja sama yang dapat terjalin menjadi tidak terbatas secara ruang dan waktu sehingga negara harus mengantisipasi adanya ancaman yang dapat merusak bangsa dan menyaring tiap elemen informasi yang masuk. Bentuk dari adanya benturan antar negara akibat percepatan arus globalisasi yakni adanya peperangan, konflik antar negara, rasa ketergantungan yang tinggi, dan lain-lain. Dalam kondisi terjadinya kemungkinan perpecahan negara karena semakin tajamnya arus globalisasi, penyelesaian konflik jalur

diplomasi menjadi pilihan yang memiliki peluang perdamaian yang lebih besar. Pentingnya globalisasi yang semakin meningkat telah mengarahkan perhatian yang mendalam pada analisis kota-kota global, terutama dalam upaya meningkatkan daya saing (Villers, 2009). Salah satu wujud kerja sama antar negara yang dilakukan adalah kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan 2 pihak meliputi 2 negara yang memiliki tujuan untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang. Penekanan dan ekspansi yang semakin luas terhadap globalisasi telah menyebabkan peningkatan fokus pada analisis kota-kota global, terutama dalam meningkatkan daya saing. Keberhasilan pembangunan dalam negeri dan kemajuan global yang terus terukur telah meningkatkan interaksi antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Interaksi yang konsisten antara negara-negara ini telah mendorong setiap negara untuk saling berhubungan dan menjalin kerja sama, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Hasil dari hubungan antarnegara ini telah menghasilkan prinsip kerja sama antarnegara, yang memiliki aturan yang ditetapkan (Nasirrudin, 2020) yakni:

1. Menghormati kedaulatan negara lain secara saling.
2. Tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.
3. Menciptakan keuntungan saling bagi semua pihak.

Berdasarkan aturan diatas, bentuk dari terjalinnya hubungan baik Indonesia dengan negara lain dapat dibuktikan dengan banyaknya Kerja sama yang telah terbentuk sampai saat ini. Hubungan internasional tidak menutup diri atau kebal dari kompleksitas globalisasi yang berlangsung di seluruh kehidupan sosial tersebut yang mana sudah memiliki praktik diplomasi sebagai bentuk umum didalamnya. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi serta komunikasi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perluasan makna diplomasi dalam hubungan internasional. Dimana globalisasi saat ini telah mengubah cara komunikasi yang terjalin antara negara dengan aktor internasional termasuk dalam proses negosiasi. Seiring dengan perkembangan abad ke-19, perbedaan semakin terasa sebagai akibat dari perubahan dari diplomasi klasik (sebuah bentuk proses komunikasi antara negara dengan negara lain) menjadi diplomasi modern.. Diplomasi modern kini tidak hanya memberikan eksklusivitas kepada para perwakilan diplomat resmi dalam suatu negara untuk menjembatani hubungan kekerabatan yang akan terjalin, namun juga memberi peluang kepada aktor hubungan internasional bukan negara

(paradiplomasi). Sehingga seiring berjalannya waktu, para aktor non-negara (*non-state actor*) yang terlibat memiliki intensi untuk menjalin berbagai bentuk komunikasi dengan negara lain yang mengarah pada hubungan kerja sama yang jangka panjang. Dalam dunia yang modern dan makin berkembangnya globalisasi, tiap negara memiliki kepentingan yang semakin beragam karena melihat adanya koneksi yang bisa dijalin dengan pemerintah di negara lain melalui aktor-aktor non-negara. Dalam konteks hubungan internasional, terdapat aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perusahaan multinasional, media, pemerintah daerah, dan kelompok-kelompok minoritas. Bahkan, individu kini memiliki inklusivitas tersendiri dalam mengembangkan koneksinya dengan pemerintah di negara lain. Diplomasi modern atau yang juga disebut diplomasi publik memiliki perbedaan dengan diplomasi konvensional/klasik. Diplomasi klasik memiliki pola hubungan yang lebih berfokus pada *government to government*, berbeda dengan diplomasi publik/modern yang memiliki pola hubungan *government to people* atau *people to people*. Jika diplomasi klasik lebih mengarahkan issue nya pada perdamaian dan peperangan, batas-batas negara (*high issue*), maka diplomasi modern lebih mengarahkan kepada *low issue* seperti budaya, ekonomi, lingkungan, pendidikan, ilmiah, dan lain sebagainya. Paradiplomasi memiliki ruang tersendiri untuk berkembang dan lebih terbuka sehingga memudahkan adanya interaksi yang substansial dan transparan antarnegara. Dalam hal ini terutama antara dua kota di dua negara yang berbeda, yaitu Kota Ambon dan Vlissingen.

Sister City merupakan instrumen dengan konsep yang efektif untuk menjabarkan globalisasi yang semakin meningkat serta mendorong kemajuan pembangunan dengan saling melengkapi kebutuhan dengan negara yang bekerjasama sesuai sumberdaya, keahlian, dan teknologi yang dimiliki. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan sister city merupakan bagian dari upaya suatu wilayah untuk menjadi kota yang lebih maju, terstruktur, dan sebagai upaya melebarkan nama melalui wujud nyata dari kerja sama itu sendiri kepada masyarakat lain di negara yang berbeda (*smart branding*). Tentu ini merupakan hal yang sangat positif. Maka, pelaksanaan program *sister city* merupakan salah satu batu loncatan suatu wilayah untuk mencapai predikat *smart city*. Konsep *smart city*, secara harfiah dikenal sebagai kota pintar, adalah suatu ide untuk mengembangkan suatu kota dengan menerapkan implementasi yang komprehensif dalam beberapa bidang. Pengimplementasian bidang teknologi yang dilakukan secara efektif dan inovatif yang

digabungkan dengan elemen ekonomi dan sosial dalam masyarakatnya sehingga nantinya akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik. Skema *sister city* yang terlaksana di berbagai kota di Indonesia merupakan sebuah bagian dari niat baik antar kedua wilayah negara. Menurut Pratama (2014), *smart city* memiliki 6 indikator diantaranya *Smart Economy*, *Smart People*, *Smart Governance*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, dan *Smart Living*. Dalam catatan sejarahnya, kota Ambon merupakan salah satu kota yang turut serta dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian PUPR. Gerakan ini bertujuan untuk membimbing Kabupaten/Kota dalam merancang *Masterplan Smart City* agar kedepannya dapat lebih memanfaatkan teknologi secara optimal, baik untuk mempercepat potensi wilayah masing-masing maupun meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Ambon memiliki beberapa target program dan kegiatan yang dirancang guna mencapai tujuannya menjadi *smart city* di tahun 2021 lalu. Kerja sama *sister city* merupakan konsep kerja sama yang memiliki banyak daya tarik dan memperluas peluang terdengarnya program-program atau aktor yang ada pada suatu wilayah. Kerja sama *sister city* bisa menjadi peran dalam mewujudkan kesejahteraan dunia di tahun 2030 karena melalui menjalani kemitraan dan kerja sama yang inklusif, *sister city* bisa meningkatkan penguatan kota sebagai basis untuk *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Karena mampu menjadi salah satu strategi untuk menghadapi tantangan di era informasi yang cenderung terdapat percepatan transformasi didalamnya, oleh karena itu, terakselerasinya pertumbuhan ekonomi pada suatu kota/wilayah dapat dikatakan sebagai tujuan utama dari dilaksanakannya perjanjian *sister city* di antara kota-kota yang terlibat.

Kota Ambon memiliki kondisi yang menguntungkan dan berbagai keunggulan yang memungkinkan persaingan dengan tingkat global. Selain itu, kebijakan otonomi daerah mendorong pemerintah Kota Ambon untuk menjadi lebih independen dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah negara. Hal ini mendorong pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam hubungan internasional dan kerja sama untuk mengembangkan potensi daerah, baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengeksekusi pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu jalan keluar untuk meningkatkan

potensi Kota Ambon adalah dengan mengembangkan kerja sama pemerintahan, tidak hanya dengan daerah otonom lain di Indonesia, tetapi juga dengan daerah lain di luar negeri seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Bentuk kerjasama ini diwujudkan melalui perjanjian internasional yang memungkinkan kedua belah pihak saling bekerja sama. Salah satu contohnya adalah kerjasama *sister city* antara Kota Ambon dan Kota Vlissingen Darwin.

Sister City, yang dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar atau *twinning city*, merupakan istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada kerjasama antara kota-kota di Indonesia dengan kota lain di suatu negara yang berbeda. Kerjasama ini dapat melibatkan baik kota-kota di luar negeri maupun dalam negeri. Kerjasama tersebut umumnya bersifat luas, diresmikan secara formal, dan memiliki jangka waktu yang panjang. Dalam kerjasama *sister city*, kota-kota yang terlibat sepakat untuk membangun hubungan yang erat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, pariwisata, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk saling mendukung dan memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kemajuan di antara kedua kota tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur pembentukan kerjasama *Sister City* menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang perlu diperhatikan ketika suatu pemerintah daerah hendak menjalin kerjasama *Sister City* dengan pemerintah daerah lain, baik dalam skala domestik maupun lintas negara.

1. Persamaan dalam status administratif,
2. Persamaan dalam karakteristik,
3. Memiliki masalah yang serupa,
4. Berusaha saling melengkapi satu sama lain, dan
5. Terjadi peningkatan dalam kerjasama yang terjalin.

Sebelum pengesahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau Permendagri No. 03 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk menjalankan hubungan luar negeri..

Kerjasama antara pemerintah daerah di luar negeri didukung oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa daerah dapat melakukan kerjasama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Sister city antara Ambon dan Vlissingen menggagas awal mula kerja sama pada Maret 1996 yang kemudian diimplementasikan oleh pengurus yayasan kerja sama Vlissingen-Ambon (Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon/SSVA) yang manfaat dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat kedua kota tersebut dan tentunya masyarakat kota lain di sekitarnya. Kota Ambon dan Vlissingen mengawali kerja sama kolaboratif mereka pada bidang lingkungan dan pendidikan yang selanjutnya merambah pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, implementasi yang telah dilakukan antara lain membangun Klinik Mata Ambon-Vlissingen, mengadakan operasi katarak dan urologi secara gratis, perbaikan kondisi kebersihan di 22 puskesmas, dan pengadaan alat AED, dan beberapa aktivitas sanitasi kebersihan lingkungan yang tentunya pada akhirnya nanti akan berdampak pada kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan terawat.

Wujud nyata dari kerja sama ini tidak hanya melalui pemberian fasilitas secara langsung ke Ambon. Namun, para tenaga kesehatan dan mahasiswa Ambon yang memerlukan studi lebih lanjut dan lebih dalam terkait kesehatan mata dapat mengunjungi *HZ University of Applied Science Vlissingen* yang telah bekerja sama dengan Universitas Pattimura. Klinik mata yang sudah terbangun memiliki peralatan yang lengkap dan dapat membantu tidak hanya warga kota Ambon, melainkan warga kabupaten dan kota lain di Maluku.

Tercatat pada tanggal 12 November tahun 2021, dalam rangka memperingati 25 tahun kerja sama antara kota Ambon dan Vlissingen, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag yaitu Mayerfas melakukan pertemuan dengan Bas Van Den Tillaar selaku Walikota Vlissingen. Selain itu, mereka membahas agenda lain guna merundingkan kelanjutan dari kerja sama *sister city* antara kota Ambon dan kota Vlissingen. Dalam cara tersebut turut hadir pula pihak dari SSVA yang dipimpin oleh Nico Lopulissa sebagai ketua dan Bob Latuheru sebagai penasehatnya. Kerja sama yang dilakukan kedua kota telah secara cukup signifikan menghasilkan kualitas hubungan yang saling menguntungkan dan sangat bermanfaat hingga saat ini.

Selain melakukan kerja sama dengan konsep sister city bersama kota Vlissingen, Kota Ambon juga melakukan melakukan kerja sama dengan kota Darwin di Australia. Program *sister city* kedua wilayah tersebut merayakan ulang tahun ke-28 pada tahun 2016. Selama perjalanan program ini, kerjasama antara keduanya semakin kuat dan erat, terutama dalam bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, ekonomi, dan pemerintahan. Kemajuan kegiatan ini terjadi secara bertahap, dimulai dari hubungan persaudaraan antara masyarakat Ambon dan Darwin sebelum resmi menjadi program kota kembar. Mulai dari acara lomba yacht pada tahun 1976 dan pertukaran pelajar dan pengajar pada tahun 1983, kerjasama ini berkembang menjadi lebih formal dengan penandatanganan perjanjian *sister city* pada tahun 1988. Kerjasama tersebut terus berkembang dari tingkat sipil ke tingkat pemerintah dan legislatif, bahkan melibatkan Indonesia secara keseluruhan dengan Wilayah *Northern Territory Australia* pada tahun 1992, termasuk kota Darwin di dalamnya. Seriusnya komitmen terhadap program ini semakin terlihat ketika kota Ambon menerima penghargaan dari Konsulat Jenderal RI di Darwin pada tahun 2013 sebagai pengakuan atas kerjasama mereka dengan kota Darwin. Penghargaan ini diberikan seiring dengan pengakuan Darwin sebagai salah satu kota terbaik dalam menjalin kerjasama internasional oleh Pemerintah Federal Australia.

Melalui paparan diatas, tentu bahwa setiap kota memiliki ciri khas dan sejarah nya masing-masing yang seiring berjalannya waktu semakin tidak bisa dipisahkan dari sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam berjalannya pemerintahan dan regulasi dalam suatu wilayah, serta kunci agar seluruh kegiatan yang berlangsung. Aspek kesehatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah suatu kota memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesehatan masyarakatnya. Berikut beberapa alasan mengapa pemerintah harus peduli terhadap kesehatan masyarakat:

- a. Kesejahteraan Masyarakat: Kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung agar warganya dapat hidup dengan baik dan bugar. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, dan berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan kota.

- b. Pencegahan Penyakit dan Penyebaran Penyakit Menular: Pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti imunisasi, promosi kesehatan, sanitasi yang baik, dan pengawasan kesehatan publik, pemerintah dapat melindungi masyarakat dari ancaman penyakit dan wabah yang dapat menyebabkan dampak yang merugikan secara sosial dan ekonomi.
- c. Mengurangi Beban Sistem Kesehatan: Dengan memperhatikan kesehatan masyarakat, pemerintah dapat membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan. Upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pendidikan masyarakat tentang gaya hidup sehat dapat mengurangi jumlah kunjungan ke rumah sakit dan permintaan pelayanan medis yang tidak perlu. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkannya.
- d. Tanggung Jawab Sosial: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Salah satu aspek utama dari tanggung jawab ini adalah melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warganya dapat menikmati hak ini dengan adil dan setara.
- e. Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan masyarakat yang baik juga berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki tingkat kehadiran kerja yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, dan biaya kesehatan yang lebih rendah. Hal ini berdampak positif pada perekonomian kota, menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi bisnis dan investasi.

Dalam keseluruhan, pemerintah perlu peduli terhadap kesehatan masyarakatnya karena hal ini mempengaruhi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan kota. Melalui upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah Kota Ambon, Darwin, dan Vlissingen juga tidak terlepas dari tanggungjawab tersebut yang nantinya akan dirasakan dampaknya oleh keseluruhan masyarakat.

Penelitian ini merupakan studi tentang terjalinnya mitra *sister city* antara Kota Ambon dengan Kota Darwin (Australia) dan Kota Vlissingen (Belanda) yang ditinjau dari aspek kesehatan. Kerjasama *sister city* ini terbentuk sebagai hasil dari pengaruh globalisasi yang cepat dan dampaknya yang meresap ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Faktor penting lainnya adalah kesadaran negara-negara bahwa mengandalkan potensi domestik saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjalin kemitraan dengan negara lain menjadi solusi yang memungkinkan. Sidik Jatmika menyatakan bahwa ini mencerminkan peralihan politik dari sistem non-demokratis ke sistem politik demokratis, yang juga mempengaruhi perubahan dalam model diplomasi dari yang tradisional menjadi modern. Perkembangan diplomasi dan munculnya aktor internasional baru dalam hubungan internasional juga turut berperan. Sekarang tidak hanya negara yang menjadi aktor utama dalam menjalin kerjasama lintas batas atau hubungan internasional, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan lintas batas dan berperan aktif dalam kerjasama luar negeri.

1.2. Rumusan Masalah

Kerjasama *sister city* yang dilaksanakan oleh Kota Ambon merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah. Wewenang tersebut salah satunya adalah melakukan Kerjasama dalam rupa paradiplomasi. Alhasil dengan kerjasama yang baik melalui *sister city* antara Kota Ambon dan Kota Vlissingen serta Kota Darwin menghasilkan signifikansi yang baik pada bidang kesehatan di Kota Ambon secara khusus dan Indonesia secara umum. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis, yaitu “Bagaimana implementasi serta luaran kerja sama Kota Ambon pada aspek kesehatan melalui skema *sister city* dengan Kota Darwin dan Vlissingen ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil kerjasama sister city Kota Ambon-Vlissingen dan Ambon-Darwin dalam bidang kesehatan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa :

1. Secara teoritis, memberikan informasi dan gambaran terkait kerjasama *Sister City* di Kota Ambon dengan kota Vlissingen dan Darwin khususnya pada aspek kesehatan ditinjau dari konsep paradiplomasi dan *sister city*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu menambah wawasan bagi para peneliti dan pengambil kebijakan mengenai hasil kerjasama *sister city* antara Kota Ambon dengan Kota Vlissingen dan Darwin sehingga menjadi salah satu kota di Indonesia yang memfokuskan kemitraan dalam bidang kesehatan.